

BAB III

PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dijelaskan di pendahuluan, bahwa penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana implementasi dari pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kabupaten Bantul.

Implementasi kebijakan Program Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul Dalam Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016 akan dijelaskan dibawah ini

A. Komunikasi

Dalam proses implementasi hal pertama yang paling penting adalah komunikasi, seperti yang telah dijelaskan oleh Edwards dalam (Winarno, 2014:178) terdapat tiga hal dalam pelaksanaan komunikasi kebijakan yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan (*clarity*). Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pejabat yang akan mengimplementasikan suatu keputusan atau kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Dalam melaksanakan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Bantul, maka pihak

pengimplementasi harus membuat suatu kegiatan atau agenda agar masyarakat mengetahui dan memahami tentang program Keluarga Berencana.

Berikut wawancara dengan bapak Harmanto selaku Kepala Seksi Pelayanan KB Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul, pada tanggal 3 Januari 2018 mengenai prosedur dilaksanakannya program:

“mekanisme operasional pertama bagaimana masyarakat mengakses KB dimulai dari penyuluhan dari tingkat basis, selanjutnya masyarakat tertarik, apabila masyarakat perlu pemahaman lebih lanjut maka dilakukan KIP (Komunikasi Interpersonal) jika penyuluhan komunikasi secara masa jika ada masyarakat yang ingin konseling secara lanjut, penyuluh merujuk atau difasilitasi ke PPK1 untuk pemegang BPJS maka KB yang dilakukan gratis namun tidak banyak masyarakat yang memilih untuk membayar daripada antri dipuskesmas walaupun punya BPJS, setelahnya dilayani oleh PPK 1. Seandainya tidak bisa seperti MOW MOP maka dirujuk ke PPK 2 yang sebelumnya koordinasi terlebih dahulu dengan PPK 1 misalnya jadwal dan jumlah orang.”

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebagaimana disini adalah pihak pengimplementasi kebijakan tersebut, mengadakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan arahan ataupun juga sosialisasi mengenai kebijakan-kebijakan dalam pertemuan lengkap dari dinas yang berkaitan kepada penyuluh program KB Kabupaten Bantul yang dilakukan setiap satu bulan sekali untuk selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat. Sebelum diadakannya mekanisme operasional maka terlebih dahulu diadakannya rapat antara pihak dinas dengan para penyuluh. Berikut hasil wawancara dengan bapak Harmanto selaku Kepala Seksi Pelayanan KB Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Bantul, pada tanggal 3 Januari 2018:

“Mekanisme operasional dimulai dari pertemuan lengkap tingkat kabupaten setiap satu bulan satu kali, diadakannya staff meeting dari team penyuluh yaitu koordinator PLKB, selanjutnya PLKB mengadakan rapat minimal satu minggu satu kali dengan penyuluh desa yang diadakan di kecamatan, rakor (rapat koordinasi) tim PLKB desa, mini lokakarya setiap bulan three componen yaitu pertemuan antara petugas KB, medis, masyarakat yang diwakili oleh kader membahas tentang masukan dari masyarakat ataupun menyampaikan informasi dari atas (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) dan menampung masukan dari bawah (masyarakat). Pembahasan yang dilakukan oleh masyarakat dan medis mengenai pencapaian kontrasepsi, kendala atau informasi baru, rakor KB kecamatan yaitu pembahasan hasil three komponen satu bulan satu kali, pertemuan pengendalian program kabupaten (radalgram) setiap akhir bulan yaitu untuk membahas data hasil kegiatan, pihak dinas kabupaten diundang kedalam pertemuan pengendalian program tersebut ke provinsi.”

Pertemuan yang diadakan antara pihak dinas dengan penyuluh ataupun pihak penyuluh dengan masyarakat yaitu untuk menyampaikan informasi mengenai program KB kepada masyarakat. penyampaian informasi dimulai dari Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada tim penyuluh dimana setiap bulannya diadakan satu kali di Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. Selanjutnya dari tim penyuluh akan disampaikan kepada tim penyuluh yang ada di setiap kecamatan. Terakhir dari informasi yang telah didapatkan dari tim penyuluh tingkat kecamatan maka akan disampaikan langsung kepada masyarakat.

Penyampaian informasi tidak hanya dilakukan oleh tim penyuluh saja, tetapi juga melalui kader-kader kesehatan seperti bidan, atau puskesmas, jadi tidak perlu langsung bertemu penyuluh KB ataupun ke Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Berikut wawancara dengan bapak Harmanto selaku Kepala Seksi Pelayanan KB Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul, pada tanggal 3 Januari 2018:

“Komunikasi antar petugas sudah dirasa baik, dalam memotivasi masyarakat untuk melaksanakan Program KB tidak hanya penyuluh tetapi juga bidan ataupun pelayanan kesehatan yang telah bekerjasama dengan Dinas untuk memberi informasi ke penyuluh atau kedinas langsung jika ada masyarakat yang menginginkan MOW/MOP. Masyarakat interval (setelah melahirkan ingin KB tetapi memiliki jeda waktu dan tidak terusan) akan difasilitasi oleh dinas.”

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah melaksanakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengimplementasian program, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat dalam mengakses informasi mengenai tata cara melaksanakan program KB dengan mudah, diantaranya melalui penyuluh program KB ataupun bidan dan indtansi kesehatan yang telah bekerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Seperti wawancara dibawah ini dengan bapak Harmanto selaku kepala seksi pelayanan KB Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Mayarakat dan Desa Kabupaten Bantul, pada tanggal 3 Januari 2018:

“Komunikasi penyuluh dengan masyarakat dapat menggunakan momentum momentum perayaan misalnya melalui, PKKKBKES, BHAYANGKARA KBKES, dan TNIKBKES.”

Berikut wawancara dengan ibu Endang selaku kader KB pada tanggal 5 Januari 2018 di Dusun Glondong Desa Tirtonirmolo yang telah ditetapkan sebagai kampung KB:

“dari kader sendiri mengejar masyarakat agar mau ikut KB, misalnya saat ada pertemuan rt, posyandu dan dasawisma yang dijadwalkan oleh masyarakat dan biasanya dihari libur.”

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan komunikasi antara petugas penyuluh dengan masyarakat menggunakan momen-momen tertentu misalnya perayaan hari ulang tahun TNI, ditingkat desa dengan memanfaatkan momen dasawisma, posyandu dan juga perkumpulan ibu-ibu PKK. Apabila pelaksanaan dalam masyarakat lingkup desa maka jadwal untuk sosialisai pun diatur oleh masyarakat sendiri. Peran penyuluh ataupun kader KB yang ada di desa besar pengaruhnya untuk pelaksanaan sosialisai mengenai program KB. Seperti yang kita ketahui tidak semua masyarakat mengetahui mengenai program KB, bahkan ada masyarakat yang beranggapan bahwa program KB tidak dibolehkan secara agama. Maka dari itu peran penyuluh dan kader sangat diperlukan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat.

B. Sumber Daya

Sumber-sumber merupakan komponen kedua yang harus diperhatikan dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Perintah-perintah implementasi mungkin

dapat diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika dalam pelaksanaannya pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kebijakan maka implementasi yang dilakukan juga kurang efektif. Adapun sumber-sumber yang penting yaitu: sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas.

1. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan implementasi suatu program sumber daya manusia merupakan komponen yang penting, karena sumber daya manusia merupakan staff ahli dan juga aktor dalam pengimplementasian kebijakan. Jumlah staff yang banyak bukan merupakan suatu jaminan akan terlaksananya suatu program dengan baik apabila tidak diimbangi dengan *skill* yang memadai dalam bidangnya suatu staff tersebut. Pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kabupaten Bantul juga memerlukan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan berkompeten dibidangnya masing-masing agar tujuan dari program KB Kabupaten Bantul dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan data dari bab II dapat diketahui bahwa ketersediaan tenaga ahli dalam pelaksanaan program KB baik dari segi pelaksana yaitu Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ataupun dari pihak penyuluh sudah dirasa cukup baik. Berikut wawancara dengan bapak Harmanto selaku Kepala Seksi Pelayanan KB Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Bantul, pada tanggal 3 Januari 2018:

“ketersediaan tenaga ahli dalam program KB di Kabupaten Bantul sudah dirasa cukup baik.”

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketersediaan staff ahli dalam pelaksanaan program KB dirasa cukup memadai. Ketersediaan staff penyuluh lapangan dengan latar belakang pendidikan yang baik juga mendukung keberhasilan program, seperti banyaknya penyuluh yang sudah berpendidikan sarjana dan juga ada pelatihan terlebih dahulu untuk penyuluh lapangan tingkat SMA saat proses penerimaannya.

2. Sumber Daya Anggaran

Dalam implementasi suatu program sumber daya anggaran merupakan komponen yang harus terpenuhi agar program dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Ketersediaan sumber daya anggaran yang cukup akan membuat kesempatan suatu program dapat diimplementasikan dengan baik dan tepat. Namun apabila kurangnya sumber daya anggaran akan menjadi penghambat suatu program dalam pengimplementasiannya dan akan membuat program tersebut terbengkalai.

Dalam konteks ini, tidak terkecuali program Keluarga Berencana (KB). seperti yang kita ketahui bahwa program Keluarga Berencana merupakan suatu program yang bertujuan agar terbentuknya keluarga kecil sejahtera melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pemberdayaan ekonomi

keluarga, peningkatan ketahanan keluarga. Dalam pelaksanaannya tidak semua masyarakat dapat menjalankan program ini dikarenakan ada beberapa program KB yang memerlukan biaya tinggi seperti pelaksanaan MOW (Metode Operasi Wanita) dan MOP (Metode Operasi Pria). Sebagaimana wawancara dengan bapak Harmanto selaku Kepala Seksi Pelayanan KB Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul, pada tanggal 3 Januari 2018:

“Program KB secara umum menjaga kelestarian peserta KB aktif dan memfasilitasi pasangan usia subur yang ingin melakukan KB, dan juga memfasilitasi apabila terjadinya efek samping dari pemakaian alat kontrasepsi komplikasi dan gagal IUD, MOW, dll.”

Berdasarkan pernyataan diatas, maka pihak pengimplementasi program tidak hanya memfasilitasi saat menjalankan program, tetapi juga saat terjadinya efek samping dari pelaksanaan program tersebut.

“Kami juga menganggarkan reward bagi masyarakat Kabupaten Bantul yang melakukan Metode Operasi Pria (MOP) dengan dikasih reward 1.000.000 per orang. Apabila reward yang dianggarkan tidak sesuai dengan jumlah orang yang melakukan Metode Operasi Pria (MOP) maka selebihnya hanya mendapat fasilitas gratis rumah sakit, dan dana pemuliahn 150.000 per orang. Selanjutnya fasilitas jemput antar dari kesehatan keseluruh Kabupaten Bantul kepada masyarakat.”

Selain anggaran yang diberikan untuk pelaksanaan MOP dan MOW, penganggaran dana juga diperuntukkan untuk penerima *reward* bagi masyarakat yang melankan Metode Operasi Pria (MOP). Selain dana yang diperuntukkan untuk pelaksanaan program, dana juga diperuntukkan untuk

biaya antar jemput masyarakat yang akan melaksanakan operasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab II mengenai rincian penggunaan dana dalam pelaksanaan program. Berdasarkan penjelasan di atas, ketersediaan dana dirasa sudah mencukupi dalam pelaksanaan program, walaupun ada beberapa kasus kurangnya dana dalam pelaksanaan MOP dan MOW.

3. Sumber Daya Fasilitas

Sumber daya fasilitas merupakan salah satu komponen penting yang harus terpenuhi setelah terpenuhinya sumber daya manusia (staff), dan sumber daya anggaran. Sumber daya fasilitas merupakan salah satu pendukung agar tercapainya suatu program sesuai dengan tujuan. Sampai saat ini pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah terpenuhi. Sumber daya fasilitas dapat berupa sarana prasarana ataupun informasi. Apabila ketersediaan fasilitas yang kurang mendukung maka suatu program akan sulit terimplementasi. Terpenuhinya fasilitas dalam implementasi suatu program dapat berarti tersedianya sumber anggaran yang cukup.

Ketersediaan fasilitas yang menunjang pelaksanaan program Keluarga Berencana antara lain berupa bis kamar operasi, mobil unit penerangan KB, Mobil unit pelayanan KB, mobil antar jemput akseptor KB, pendistribusian *gyn bed* (meja untuk pemasangan IUD dan Implant), IUD KIT, Implant KIT,

Panthom IUD, Panthom Implant, KIE KIT dan juga buku-buku mengenai prosedur pelaksanaan atau pedoman pelaksanaan program KB, dan poster . Selain peralatan tersebut juga disediakan semua jenis alat kontrasepsi yang telah didistribusikan keseluruh klinik KB yang telah bekerjasama dengan BPJS.

Berikut wawancara dengan bapak Harmanto selaku Kepala Seksi Pelayanan KB Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul, pada tanggal 3 Januari 2018:

“Ketersediaan sarana dan prasarana kita sudah cukup terutama berlaku untuk se DIY. Kita ini sudah termasuk istilahnya tidak ada daerah terpencil, masyarakat dalam mengakses kesehatan semua dianggap sudah mudah, fasilitas kesehatan sudah mulai masuk ke desa-desa dan mudahnya masyarakat dalam mengakses kesehatan.. SOP kesehatan di DIY ini dianggap sudah mencukupi. Apalagi jika jika pelaksanaan MOP dan MOW di Bantul tidak mencukupi karena penerima BPJS banyak maka akan di larika ke kota karena jarak yang tidak terlalu jauh.”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahuui bahwa dalam pelaksanaan program KB sarana dan prasarana sebagai penunjang keberhasilan program dapat dikategorikan mencukupi seperti yang tersebut diatas. Pelayanan KB di Kabupaten Bantul juga dapat dikategorikan strategis, dimana apabila rumah sakit yang ada di Kabupaten Bantul tidak memungkinkan untuk menampung banyaknya jumlah peserta KB maka untuk merujuk ke rurusah sakit di kota pun tidak jauh. Bahkan utuk penunjang tambahan apabila memang dibutuhkan sudah tersedia bis kamar operasi. Ketersediaan sarana dan prasarana tidak hanya untuk menjalankan program KB saja, tetapi juga didukung dengan adanya sarana dan prasarana tambahan sebagai media sosialisai seperti adanya poster,

liflets, dan buku-buku petunjuk serta pedoman mengenai program KB. Seperti wawancara berikut dengan bapak Harmanto selaku Kepala Seksi

Pelayanan KB Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul, pada tanggal 3 Januari 2018:

“Pendistribusian alat kontrasepsi yang diberikan pemerintah melalui APBN jadi tidak sama dengan penjualan alat kontrasepsi yang ada di apotik. Pendistribusiannya yaitu dimulai dari pabrik farmasi kemudian kita tender lalu ke gudang BKKBN pusat, gudang BKKBN provinsi, lalu sampai di Bantul yang namanya OPD KB (organisasi pemerintah daerah), lalu disebar ke faskes 1 dan 2. Sebelumnya adanya BPJS dulu juga sampai kebidan-bidan praktik kalau sekarang tidak. Sesuai dengan instruksi dari pusat, kalau bidan sekarang harus sub dari PPK 1. Berbeda dengan pendistribusian alat kontrasepsi di apotik dimulai dari pabrik farmasi lalu pedagang besar farmasi terakhir ke agen-agen menyebar ke toko obat.”

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bagaimana pendistribusian alat kontrasepsi dari pusat ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Sama halnya dengan daerah lain maka pendistribusian alat kontrasepsi yang ada di Kabupaten Bantul juga melalui proses yang tersebut diatas. Berdasarkan keterangan diatas juga dapat diketahui bahwa dalam pembelian alat kontrasepsi diperoleh melalui APBN yang selanjutnya didistribusikan ke wilayah Indonesia. Setelah pendistribusian sampai ke Pemerintah Daerah Bantul, maka selanjutnya dari pihak Pemerintah Daerah Bantul sendiri mendistribusikan ke pusat pelayanan kesehatan (PPK) satu dan pusat pelayanan kesehatan (PPK) 2 yang telah menyediakan fasilitas BPJS dan selanjutnya akan didistribusikan ke masyarakat.

Berbeda dengan penjualan alat kontrasepsi yang ada di apotik dan toko-toko, dimana pendistribusiannya dari pabrik farmasi langsung didistribusikan kepedagang besar obat. Sedangkan alat-alat kontrasepsi yang ada di apotik dan toko-toko obat masyarakat berarti harus membayar sendiri untuk mendapatkan alat tersebut. Berbeda dengan masyarakat yang mendapatkan alat kontrasepsi dari Pusat Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan BPJS maka masyarakat gratis untuk mendapatkan alat kontrasepsi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul baik SDM maupun sarana dan prasarana dan juga sumber daya anggaran sudah tercukupi. Ketersediaan tenaga ahli dalam pelaksanaan program KBdirasa cukup baik hal tersebut terbukti dengan rata-rata petugas yang terlatih dan berpendidikan sesuai dengan bidangnya baik didalam lingkup dinas ataupun para petugas penyuluh lapangan.

C. Sikap Pelaksana

Komitmen yang tinggi harus dijunjung tinggi oleh setiap orang yang diberikan tanggungjawab. Selain itu kejujuran, tingkat kedisiplinan pegawai, dan juga bagaimana sikap dari setiap individu yang menjalankan sebuah tanggungjawab. Berikut merupakan wawancara dengan bapak Harmanto selaku Kepala Seksi Pelayanan KB Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul, pada tanggal 3 Januari 2018:

“karena tupoksi yang sudah jelas mencari peserta KB tingkat kedisiplinan petugas Alhamdulillah sudah baik apalai kan pake finger setiap pagi dan sore, kalo untuk petugas lapangan juga ada finger ya di setiap Kecamatan nanti dikirimkan ke sini lalu dari sini dikirim ke DIY sebagai petugas pusat kalau kita sebagai petugas kabupaten yang mengawasi mereka memberdayan mereka. Kalau ada petugas yang tidak disiplin nanti kami undang kemudian diberikan sanksi dipindah tempat atau untuk sementara di staffkan atau tidak dibolehkan dulu ke masyarakat. jadi perpindahan petugas itu ada dua kemungkinan, pertama ada kemungkinan promosi untuk memperbaiki suatu wilayah atau dia ada kesalahan biar tidak mengulangi kesalahan di wilayah yang baru.”

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan keidsiplinan para staff dalam program KB sudah dapat dikategorikan baik. Dimana setiap hari bagi pegawai di kabupaten ataupun pegawai lapangan diwajibkan melakukan absen melalui *finger print* baik yang disediakan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ataupun disetiap kecamatan bagi para pegawai lapangan. Selain adanya presensi, bagi pegawai yang melanggar ketertiban maka akan diberikan sanksi seperti adanya pemindahan tugas di kecamatan lain ataupun distaffkan dalam artian tidak diperbolehkan turun ke masyarakat untuk sementara.

Tingkat kedisiplinan para petugas juga sangat penting mengingat jika petugas memiliki tanggung jawab untuk perannya. Apabila petugas tidak

menjalankan tanggung jawab dengan baik maka pelaksanaan program dapat terhambat karena kurang maksimalnya dalam pengimplementasian program.

Dalam hal ini para petugas kabupaten di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul bertanggungjawab terhadap para petugas dilapangan dengan memberikan pembinaan dan pelatihan untuk selanjutnya di pertanggungjawabkan ke provinsi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program KB di Kabupaten Bantul pelayanan yang diberikan petugas kepada masyarakat juga dirasa cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan penjelasan adanya layanan sistem antar jemput dari petugas kepada masyarakat yang akan melaksanakan MOP dan MOW, serta tersedianya konsultasi secara personal antar petugas dengan masyarakat yang belum memahami mengenai program KB. Selain dari pelayanan yang baik, dalam

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga sudah menerapkan sanksi yang tegas bagi pegawai yang melanggar aturan.

D. Struktur Birokrasi

1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1993 Tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjelaskan bahwa yang bertanggung jawab terhadap program Keluarga Nasional adalah BKKBN, yang mana selanjutnya dilimpahkan kesetiap wilayah yang ada di Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Bantul DIY.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul Menjelaskan Bahwa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Memiliki Fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- c. Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Sesuai Dengan Lingkup Tugasnya; Dan
- e. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.

Berdasarkan penjelasan fungsi dinas tersebut, maka yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana Di Kabupaten Bantul adalah

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul, dan terkhusus lagi Bidang Keluarga Berencana.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat adalah aktor utama dalam pelaksanaan Program KB Di Kabupaten Bantul. Dalam pelaksanaannya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa bekerjasama dengan Dinas

Kesehatan Kabupaten Bantul. Kerjasama yang terjadi dapat berupa kerjasama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan desa dengan rumah sakit di Kabupaten Bantul yang telah menyediakan fasilitas BPJS. Seperti yang kita ketahui bahwa rumah sakit yang ada Di Kabupaten Bantul sendiri berada di bawah pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Selain kerjasama yang dilakukan dengan rumah sakit daerah juga melakukan kerjasama dengan rumah sakit swasta yang menyediakan pelayanan BPJS.

Berdasarkan penjelasan di atas, pemberian wewenang dari pusat ke daerah dirasa cukup efektif dalam implementasi suatu program agar program lebih maksimal dalam pelaksanaannya. Pemberian wewenang dalam pelaksanaan program KB yaitu dari BKKBN pusat dan selanjutnya memberikan wewenang ke setiap wilayah yang ada di Indonesia. Dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Dinas Kesehatan di Kabupaten Bantul.

E. Pengaruh Program KB Dalam Menghambat Pertumbuhan Penduduk Di Kabupaten Bantul

Di era globalisasi persaingan antar negara semakin sengit dan ketat, untuk menghadapi tantangan tersebut maka dibutuhkannya keluarga yang terencana dengan baik, sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan yang pertama berasal dari keluarga. Peran keluarga yang sangat penting tersebut maka haruslah merencanakan untuk kehidupan masa depan yang baik untuk anak-anaknya. Semakin banyak anak dalam suatu keluarga maka berarti semakin banyak pula kebutuhan yang harus dipenuhi.

Jangan sampai masa depan anak tidak terencana dengan baik dikarenakan beberapa alasan terutama masalah ekonomi. Maka dari itu, pentingnya untuk mengatur perencanaan masa depan dalam sebuah keluarga agar terciptanya keluarga yang berkualitas dan bahagia.

Dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki tujuan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana dimana program ini memiliki slogan “Dua Anak Cukup” serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat desa agar menjadi keluarga kecil berkualitas dan bahagia.

Implementasi yang baik dan tepat akan berdampak pada suksesnya suatu program. Sebagaimana dalam hal implementasi program Keluarga Berencana yang dilaksanakan dengan baik akan berdampak pula pada terbentuknya keluarga yang sejahtera serta dapat membantu penekanan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bantul. Sasaran peserta KB (aunmednit) adalah pasangan usia subur (PUS) yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi. Maksud dari ingin anak ditunda adalah misalnya sudah mempunyai anak satu belum KB lalu dia merencanakan mempunyai anak lagi saat usia anak pertama lima tahun. Yang kedua yaitu tidak ingin punya anak lagi, misalnya dengan keinginan sebuah keluarga yang hanya ingin memiliki dua anak.

Dengan pemakaian alat kontrasepsi juga dapat mengurangi atau mencegah penularan penyakit penyakit melalui seks.

Berikut merupakan wawancara dengan Bapak Harmanto pada tanggal 3 Januari

2018 selaku Kepala Seksi Pelayanan KB:

“Pengaruh pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bantul dalam dinas KB melalui pengaturan pengendalian kelahiran dengan KB. program KB sangat berpengaruh dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk karena dijadikan tolak ukur jumlah jiwa dalam keluarga. Dampak pertumbuhan penduduk yg tidak terkendali berkurangnya fasilitas sekolah, kesehatan, lahan, perumahan, , bahan pokok pangan”

Salah satu program yang dapat menekan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bantul yaitu melalui program Keluarga Berencana (KB), dimana berdasarkan wawancara diatas disebutkan bahwa dengan adanya program KB maka pemerintah dapat memberikan sosialisai kepada masyarakat mengenai pentingnya menekan laju pertumbuhan penduduk. Selain untuk menekan laju pertumbuhan penduduk program KB juga memiliki tugas secara umum adalah segala upaya untuk mewujudkan keluarga kecil sejahtera melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan ketahanan keluarga.

Pada Tahun 2016 Badan Keluarga Kecil Berencana Nasional (BKKBN) memprakarsai inisiatif baru yang disebut dengan “Kampung KB” dengan sasaran miskin, daerah perkotaan padat penduduk, desa nelayan, daerah kumuh dan daerah tertinggal. Dengan adanya kampung KB di Kabupaten Bantul diharapkan dapat memaksimalkan pelaksanaan dan tujuan program Keluarga Berencana. Berikut

wawancara dengan Bapak Harmanto selaku Kepala Seksi Pelayanan KB mengenai Kampung KB di Kabupaten Bantul pada tanggal 3 Januari 2018:

“Kegiatan untuk meningkatkan program KB. Contoh kampung KB yaitu pencapaian yang ada di kampung serba rendah bukan hanya bidang KB tapi sosial, pendidikan, kesehatan. Jadi kampung KB tidak hanya di bawah oleh DPPKB tetapi juga Dinas Kesehatan ,dan juga Dinas PU cara pengerjaan model LSM yang dikeroyok oleh beberapa dinas.”

Dari hasil wawancara diatas dalam pelaksanaannya kampung KB tidak hanya berada di bawah pengawasan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tetapi juga Dinas Kesehatan dan juga Dinas Pekerjaan Umum. Di Kabupaten Bantul sendiri kampung KB berada di setiap kecamatan yang berarti jumlah kampung KB di Kabupaten Bantul sebanyak 17.

Adapun capaian ideal target yang ditetapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan program Keluarga berencana untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Berikut wawancara dengan Bapak Kodrat pada tanggal 3 Januari 2018:

“jadi TFR (menghitung/melihat seberapa banyak rata-rata jumlah dalam satu keluarga), untuk TFR di Kabupaten Bantul masih 2,1 yang artinya disitu ada dua atau lebih anak bisa empat atau lima anak. Sekarang kita maunya dibawah dua, sedangkan kalau 2,1 dikatakan belum berhasil karenakan kita programnya dua anak cukup.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa capaian ideal yang ingin dicapai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Bantul yaitu dibawah dua, yang berarti setiap

keluarga diharapkan hanya memiliki dua anak atau kurang sehingga dapat membantu menekan laju pertumbuhan penduduk. Sedangkan untuk saat ini tren di Kabupaten Bantul masih 2,1 yang berarti dalam sebuah keluarga masih memiliki dua atau lebih anak dan dapat dikatakan belum berhasil.

Dalam pelaksanaannya tidak semua masyarakat dapat menerima program tersebut. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Bantul mengenai pelaksanaan program KB. berikut wawancara dengan Bapak Harmanto pada tanggal 3 Januari 2018 selaku Kepala Seksi Pelayanan KB mengenai kesulitan dalam pelaksanaan program KB di Kabupaten Bantul:

“ada beberapa kendala yang dihadapi seperti MOP itu adalah fasektomi dalam pemahaman dalam masyarakat asidektomi/ kebiri, kepercayaan beberapa masyarakat bahwa KB adalah haram dan punya anak tidak boleh dicegah. Pihak dinas sudah konsultasi dengan MUI dan tokoh lintas agama mengerahkan petugas untuk menghilangkan isu dan memberi pemahaman kepada masyarakat.”

Selanjutnya merupakan wawancara dengan Ibu Endang pada tanggal 5 Januari 2018 selaku Kader KB di Dusun Glondong Desa Tirtonirmolo:

“Kesulitannya ya kadang-kadang gak cocok dalam penggunaan alat KB, mereka masih ingin punya anak lagi, ada beberapa yang masih pake KB kalender jadi tidak mau pake KB yang seperti umumnya, ada juga yang masih menganggap KB itu tidak dibolehkan.”

Hasil wawancara diatas terdapat kendala yang dihadapi pemerintah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar tercapai tujuan dari program KB sendiri untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang ada di Kabupaten Bantul dan juga terbentuknya keluarga kecil bahagia dan berkualitas. Adapun kriteria keberhasilan program KB Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu tercapainya target tahunan di Kabupaten Bantul , menurunnya angka kematian ibu dan bayi, jumlah jiwa dalam keluarga semakin kecil.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa program KB dapat dikatakan membawa pengaruh dalam pengendalian penduduk, karena dijadikan tolak ukur jumlah jiwa dalam keluarga. Program KB tidak hanya mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui penekanan jumlah kelahiran, tetapi juga sebagai edukasi keluarga sejahtera dan berkualitas. Dalam menghitung jumlah jiwa dalam keluarga dapat melalui *TFR*, sebagaimana *TFR* di Kabupaten Bantul sendiri masih 2,1 yang artinya dalam sebuah keluarga terdapat dua anak lebih sehingga angka *TFR* 2,1 dapat dikategorikan belum tercapai. Sebagaimana yang kita ketahui dalam pelaksanaan program KB ditekankan untuk memiliki dua anak cukup dan hal tersebut berarti *TFR* di Kabupaten Bantul harus berada di bawah 2.

F. Implikasi Hasil Pembahasan

Dalam suatu program yang diimplementasikan pastinya akan ada suatu dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan pembahasan diatas, berikut merupakan beberapa implikasi yang ditimbulkan dari program Keluarga Berencana di Kabupaten Bantul:

1. Komunikasi

Berdasarkan penjelasan dari bab III dapat diketahui komunikasi antara petugas dan masyarakat ataupun masyarakat dengan petugas sudah dapat dikatakan baik. Hal tersebut terbukti dengan adanya agenda pertemuan lengkap yang diadakan setiap satu bulan sekali, dimana dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh petugas dari provinsi, dari kabupaten dan juga petugas basis/ penyuluh yang ada dikecamatan. Dalam pertemuan lengkap tersebut dibahas mengenai prosedur dalam penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai program KB, serta evaluasi dalam pelaksanaan program. Selanjutnya informasi yang didapatkan petugas dalam pertemuan lengkap akan disampaikan kepada masyarakat melalui momenmomen tertentu ataupun sosialisasi secara langsung kepada masyarakat.

2. Sikap Pelaksana

Dalam pelaksanaan program KB di Kabupaten Bantul pelayanan yang diberikan petugas kepada masyarakat juga dirasa cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penjelasan mengenai layanan sistem antar jemput dari petugas kepada masyarakat yang akan melaksanakan MOP dan MOW, serta tersedianya konsultasi secara personal antar petugas dengan masyarakat yang belum memahami mengenai program KB. Selanjutnya yaitu dibuktikan dengan adanya sanksi bagi penyuluh atau petugas yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya, sehingga petugas diharapkan dapat lebih baik dalam melaksanakan tugasnya.

3. Struktur Organisasi

Pemberian wewenang dari pusat ke daerah dirasa cukup efektif dalam implementasi suatu program agar program lebih maksimal dalam pelaksanaannya. Pemberian wewenang dalam pelaksanaan program KB yaitu dari BKKBN pusat dan selanjutnya memberikan wewenang ke setiap wilayah yang ada di Indonesia.

Dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Dinas Kesehatan di Kabupaten Bantul.